

Geneva Internet Platform

DigitalWatch

NEWSLETTER
INDONESIA

Anda menerima banyak potongan informasi terkait kebijakan digital. Kami juga menerimanya. Kami mengurai, membuatnya kontekstual serta menganalisisnya. Lalu kami meringkasnya untuk anda.

TREND KEBIJAKAN DIGITAL BULAN NOVEMBER

1. Pencarian norma-siber berlanjut

Setelah pertemuan kelima Kelompok Ahli Pemerintah di Bidang Pembangunan Informasi dan Telekomunikasi dalam Konteks Keamanan Internasional (UN GGE) PBB berakhir tanpa konsensus, pencarian cara untuk menangani isu keamanan siber di tingkat global terus berlanjut.

Di Jenewa, Presiden Microsoft memperbarui keputusannya terhadap sebuah Konvensi Digital Jenewa sebagai cara untuk membuat pemerintah bertanggung jawab terhadap keamanan siber. Pada saat yang sama, Diskusi Digital Jenewa memberikan solusi teknis terkait tantangan keamanan siber yang semakin berkembang. Walaupun banyak aspek politis dalam debat keamanan siber, solusi teknis tetap mampu memperbaiki beberapa masalah utama keamanan siber. *Lebih lanjut di halaman 2.*

Di New Delhi, Konferensi Global Ruang Siber membahas beberapa aspek kerja sama global terkait keamanan siber, khususnya pengembangan kapasitas. Di waktu yang sama, Global Commission on the Stability of Cyberspace (GCSC) mengeluarkan Seruan untuk Melindungi Inti Publik dari Internet, mendesak aktor pemerintah dan non-pemerintah untuk menghindari aktivitas yang dapat secara sengaja dan secara substansi merusak ketersediaan ataupun integritas dari 'inti publik' dari Internet.

Masih akan ditinjau lagi, bagaimana aktor-aktor besar di bidang siber bereaksi terhadap seruan ini.

Pertanyaan utamanya adalah di mana dan bagaimana pemerintahan akan bersatu lagi untuk mengadopsi solusi global keamanan siber.

2. Debat senjata mematikan otonom terungkap

Debat tentang sistem senjata mematikan otonom (Lethal Autonomous Weapon System/LAWS) berlanjut bulan ini dengan 1 minggu diskusi tingkat tinggi di Jenewa. Kelompok Pakar dari Pemerintahan yang baru dibentuk (Group of Governmental Experts – GGE) di bawah kerangka Konvensi tentang Senjata Konvensional Tertentu, menghasilkan berbagai kesimpulan setelah diskusi dengan para pakar.

Kelompok pakar mengambil pendekatan realistis terhadap pengembangan LAWS, menyimpulkan bahwa teknologi tersebut sepatutnya tidak perlu terlalu dihebohkan atau diremehkan. Walaupun sistem senjata yang benar-benar otonom belum tersedia saat ini, tetap muncul pertanyaan bagaimana risiko terkait LAWS dapat dikurangi? Diskusi GGE menunjukkan beberapa solusi.

Lanjutan di halaman 3



Bitcoin meningkat melebihi \$11 000 per unit pada Rabu, 29 November, beberapa jam setelah melewati \$10 000. *Lebih banyak perkembangan kebijakan digital di halaman.*

DI EDISI INI

DISKUSI JENEWA



Dari Diskusi Digital Jenewa ke diskusi tingkat tinggi pada kebijakan digital, kami meringkas hasil utama pertemuan di Jenewa.

Lebih lanjut di halaman 2

NETRALITAS JARINGAN



Aturan netralitas jaringan diharapkan untuk diterapkan kembali di AS. Kami melihat reaksinya dan apa yang mungkin akan terjadi setelah pemungutan suara.

Lebih lanjut di halaman 6

SENJATA MEMATIKAN OTONOM



Para pakar baru-baru ini mengeksplorasi implikasi teknologi, militer, hukum dan etik terkait sistem tersebut. Muncul lima isu utama.

Lebih lanjut di halaman 7

INTERNET GOVERNANCE FORUM



GIP akan aktif berpartisipasi pada Internet Governance Forum ke-12 pada 18–21 Desember 2017 di Jenewa.

Lebih lanjut di halaman 8



Edisi No. 26 Geneva Digital Watch newsletter. Diterbitkan tanggal 30 November 2017 oleh Geneva Internet Platform (GIP) dan DiploFoundation | Penerjemah ke Bahasa Indonesia: Shita Laksmi, Oni Budipramono, Anton Muhajir | Kontributor: Stephanie Borg Psaila, Jovan Kurbalija, Virginia Paque, Roxana Radu, Barbara Rosen Jacobson, Sorina Teleanu | Desain oleh Viktor Mijatović, layout oleh Aleksandar Nedeljkov, Diplo's Creative Lab | Selain newsletter, Anda bisa mendapatkan informasi lebih dalam terkait perkembangan kebijakan digital di GIP Digital Watch Observatory (<http://dig.watch>) dan ikut diskusi setiap Selasa terakhir setiap bulan di hub lokal negara Anda, atau di GIP (<http://dig.watch/briefings>) | Kirim komentar Anda ke digitalwatch@diplomacy.edu

Bagaimana Solusi Teknologi Dapat Memajukan Keamanan Siber?

Sesi kedua [Geneva Digital Talks](#), pada 3 November, mendiskusikan bagaimana keamanan siber sebagai sebuah bidang berinteraksi dengan perubahan teknologi mutakhir maupun potensi perubahannya. Diskusi panel menggarisbawahi dikotomi antara teknologi dan kebijakan di bidang keamanan siber serta perlunya meningkatkan kepercayaan dan kolaborasi antara dua bidang tersebut. Di sisi teknologi, sebuah solusi praktis diajukan: arsitektur Scalability, Control, and Isolation on Next-Generation Networks (SCION), dikembangkan oleh sebuah tim di ETH Zurich, memungkinkan individu untuk mengontrol jalur yang ditempuh oleh data mereka, sembari menyediakan tambahan lapisan keamanan dengan cara memastikan kontrol yang lebih menyeluruh dari jaringan mereka.

Minggu Perdamaian Jenewa 2017

Selama edisi 2017 dari Minggu Perdamaian Jenewa, pada 6-10 November, menjadi lebih jelas bahwa teknologi digital memiliki implikasi penting untuk pencegahan konflik, walaupun terdapat dua cara berbeda dan kontradiktif. Beberapa sesi mengidentifikasi cara-cara di mana teknologi digital dapat membantu mencegah konflik. Mereka menggarisbawahi potensi e-dagang, big data, kecerdasan buatan, dan sistem informasi geografis. Di sisi lain, terdapat fokus pada cara-cara di mana teknologi digital justru telah memunculkan ancaman yang meningkat.

Mencegah Konflik Siber: Apakah Kita Perlu Traktat Siber?

Sesi ketiga Geneva Digital Talks, pada 9 November, dilaksanakan atas seruan presiden Microsoft Brad Smith untuk Konvensi Digital Jenewa, dan mengembangkan sekitar tiga pertimbangan utama. Pertama, diasumsikan bahwa menangani tantangan keamanan siber membutuhkan pergeseran mental: 'Perdamaian tidak bisa diindoktrinasi tetapi perlu untuk didiskusikan sebagai mentalitas, sebagai iklim.' Kedua, pembicara menekankan pentingnya pendekatan beragam pemangku kepentingan untuk menyusun sebuah kemungkinan traktat siber (sebagai contoh, proses Montreux). Terakhir, telah dicatat bahwa proposal Microsoft adalah sebuah ucapan selamat datang bagi pemerintahan untuk mengambil tindakan dalam menangani kelemahan di dunia siber.

Big Data untuk Pencegahan: Menyeimbangkan Kesempatan dan Tantangan

Diadakan sebagai bagian dari Minggu Perdamaian Jenewa 2017, sesi ini mengeksplorasi potensi big data untuk mencegah konflik. Diskusi menegaskan bahwa teknologi bisa mewakili risiko yang menyebabkan konflik sekaligus menjadi faktor untuk mencegah. Data tersebut juga mungkin memiliki multiinterpretasi dan faset. Visualisasi (seperti sistem yang dikembangkan UN Interregional Crime and Justice Research Institute (UNICRI) dan CERN) memainkan peran penting dalam membantu analisis dan penyediaan basis data pengetahuan. Data satelit menjadi contoh bahwa *big data* dapat berkontribusi pada pencegahan konflik dengan melaporkan dan mendokumentasikan indikator peringatan dini serta menyediakan informasi yang dapat ditindaklanjuti untuk komunitas nasional dan internasional.

Tantangan Pengaturan Internet Saat Ini: Apa Selanjutnya?

Acara ini diadakan pada 9 November, menampilkan diskusi tantangan pengaturan Internet saat ini dan cara-cara untuk mengatasinya. Di samping manfaat yang didapat dari Internet, masih ada lebih dari 3,5 miliar orang belum terkoneksi. Risiko konflik dan lomba persenjataan baru yang melibatkan senjata siber, propaganda teroris daring dan kekerasan ekstrem diidentifikasi sebagai tantangan baru, yang membutuhkan kemauan politik untuk mencarinya. Fokus diskusi adalah pada keamanan siber dan perlunya melihat sebagai kewajiban bersama. Di sisi ini, presiden Microsoft Brad Smith mengulangi proposal untuk kesepakatan sektor teknologi di bidang keamanan siber, dan sebuah Digital Geneva Convention untuk memandu perilaku pemerintahan di dunia siber.

Ekonomi Berbagi dan Tantangan Sosialnya

Diskusi tingkat tinggi ini, pada 21 November, fokus pada cara kerja kerangka digital dan bagaimana menentukan apakah mereka memperkuat atau mengeksploitasi pekerjaannya. Model bisnis baru ekonomi berbagi bertumpu pada efek jaringan: perusahaan tidak lagi membuat barang atau jasa; tapi menyediakan infrastruktur umum dan mencocokkan konsumen dan produsen menggunakan pengetahuan akan pasar. Para pembicara sepakat bahwa fungsi sosial selayaknya menjadi fokus dan solusinya harus berpusat pada orang.

Forum PBB ke-6 untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia

Diadakan pada 27-29 November dengan tema 'Mewujudkan akses untuk perbaikan efektif', Forum menampilkan lebih dari 60 sesi tentang hak asasi manusia terkait bisnis. Diskusi menekankan bahwa walaupun teknologi berperan penting bagi masyarakat modern, perkembangan teknologi telah meningkatkan keprihatinan terhadap perlindungan hak asasi manusia, seperti privasi dan kebebasan berekspresi. Bentuk baru dari pelanggaran hak asasi manusia di era digital bisa dihindari jika para pemangku kepentingan – perusahaan, pemerintahan, dan masyarakat sipil – bekerja sama dalam mengidentifikasi dan menerapkan alat bantu untuk melindungi dan menghormati hak asasi manusia.

Di mana dan Bagaimana Melindungi Kepentingan Hukum di Era Digital

Di sesi ini, diadakan pada 28 November sebagai bagian dari Geneva Digital Talks, tiga panelis menawarkan jawaban dari perspektif berbeda, terkait pertanyaan, apakah peran pengadilan dalam Tata Kelola Internet dan bagaimana akses terhadap keadilan bisa dipastikan berjalan di dunia daring. Diskusi ini merefleksikan bagaimana peraturan berjalan di isu Tata Kelola Internet, membandingkan mereka dengan isu teknologi terkini. Kebijakan digital dan praktik arbitrasi membuat posisi Geneva menjadi lebih penting sebagai pusat untuk solusi global.

TREND KEBIJAKAN DIGITAL BULAN NOVEMBER

Sambungan dari halaman 1

Mengadakan tinjauan persenjataan legal nasional dibutuhkan oleh Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa. Hal ini dianggap sebagai jaminan untuk memastikan agar senjata baru yang dikembangkan tunduk terhadap hukum humanitarian internasional. Namun, beberapa negara menyatakan bahwa tinjauan nasional saja tidak cukup.

Mengembangkan pilihan kebijakan bisa mencakup instrumen hukum, seperti tambahan protokol, melarang LAWS; deklarasi yang mengikat secara politis; atau Kode Etik masa depan. Para pakar juga mengungkapkan perlunya moratorium dalam waktu dekat terkait penempatan LAWS. Beberapa pendapat menganggap pelarangan sebagai hal prematur karena senjata seperti itu belum ada.

Mitigasi risiko juga dapat diintegrasikan lebih jauh ke dalam rancangan. Industri sedang bekerja untuk mengatasi risiko-risiko, 'termasuk melalui validasi dan verifikasi ketat serta metodologi pengecekan dan evaluasi. Beberapa pihak mengintegrasikan etika dalam rancangan dan pengembangan serta mencari praktik terbaik dari seluruh dunia.' Negara-negara dapat mendorong praktik ini lebih jauh.

Analisis tambahan terhadap isu utama yang muncul selama diskusi ada di halaman 7.

3. Gagal diungkap: Tambahan kebocoran dan kelemahan

Uber lagi-lagi disorot, kali ini karena kebocoran data yang tidak diungkapkan. Setelah server perusahaan dibobol pada tahun 2016, Uber membayar \$100.000 kepada penyerangnya untuk menghapus data dan tidak mengungkapkannya, seperti diungkap Bloomberg. Pelaku tindak kriminal mengakses nama, alamat surel dan nomor telpon lebih dari 50 juta penumpang Uber, termasuk juga informasi pribadi sekitar 7 juta supir Uber.

Pertanyaannya adalah: Apakah perusahaan wajib mengungkapkan kebocoran data? Sistem hukum di AS mewajibkan perusahaan untuk memberi tahu publik dan badan pemerintah. Untuk data masyarakat Eropa, Regulasi Proteksi Data Umum Uni Eropa yang akan efektif mulai Mei 2018, juga akan mewajibkan perusahaan untuk segera melaporkan kebocoran.

Sebaliknya, kelemahan yang ditemukan pemerintah juga harus diungkapkan. Pada bulan November, Gedung Putih AS menerbitkan versi baru dari Vulnerability Equity Process (VEP), di mana badan keamanan AS memutuskan kelemahan mana yang akan diungkap ke pembuat perangkat lunak dan mana yang tidak. Pemerintah mengungkapkan lebih dari 90% kelemahan yang ditemukan.

Bagaimana sisanya? Kelemahan yang tidak diungkap dapat dibocorkan dan menyebabkan kekacauan global lagi, seperti yang telah dilakukan oleh ransomware WannaCry. Edward Snowden telah memperingatkan bahwa tidak mengungkapkan 10 lubang keamanan besar mengalahkan manfaat mengungkapkan 90 lubang keamanan kecil.

4. Pengadilan mempertajam kebijakan digital; kompleksitas muncul

Sekali lagi, pengadilan-pengadilan melanjutkan upaya mempertajam penerapan kebijakan digital di beberapa wilayah hukum berbeda, yang justru menambah kompleksitas di dalam prosesnya.

Bulan ini, seorang hakim AS menghadang keputusan Pengadilan Tinggi Kanada agar tidak berlaku di AS. Di bulan Juni, Pengadilan

Tinggi Kanada telah memerintahkan Google untuk menghapus hasil pencarian yang melanggar hak kekayaan intelektual di seluruh dunia, tidak hanya di Kanada.

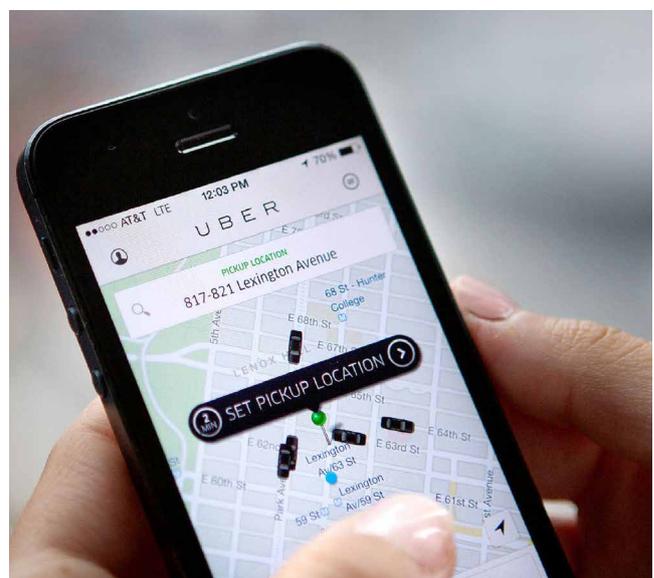
Ini bukan kali pertama sebuah pengadilan mengeluarkan putusan yang bertentangan. Sebuah pengadilan banding memutuskan pemerintah tidak bisa memerintahkan penggeledahan untuk memaksa Microsoft memberikan data yang disimpan di Dublin, Irlandia, tapi pengadilan Philadelphia memutuskan Google harus tunduk pada perintah penggeledahan FBI (di kasus Google, data dianggap sebuah 'target bergerak'). Kasus terkait Uber memberikan contoh lain: Walaupun beberapa pengadilan telah memutuskan bahwa sopir Uber adalah pekerja kontrak independen, pengadilan lain telah memutuskan bahwa supir adalah pegawai. Seperti sebuah catatan ahli, keputusan pengadilan kadang mengakibatkan aturan yang saling bertentangan.

5. Gejolak terlihat pada negosiasi e-dagang sebelum MC11

Sebelum World Trade Organization (WTO) Ministerial Conference (MC11) bulan depan, gejolak sudah mulai muncul di antara negara maju dan negara berkembang. Seperti catatan kami bulan lalu, isu kebijakan digital semakin dianggap sebagai isu terkait perdagangan. Beberapa negara memilih untuk menegosiasikan aturan e-dagang baru, tetapi beberapa negara lain tidak sepakat.

Dalam debat yang terus berlanjut, mayoritas negara berkembang, termasuk India dan Afrika Selatan, telah secara jelas menyatakan tidak setuju dengan negosiasi tersebut. Pada saat pertemuan yang diadakan General Council Chair berlangsung pada 21 November, negara-negara ini menyatakan mereka hanya akan mengikuti program kerja tahun 1998 yang tidak mengikat. Uni Eropa, bersama Jepang dan negara maju lain, menganjurkan untuk memajukan agenda e-dagang. Uni Eropa percaya, pembahasan aspek terkait perdagangan yang lebih baru, akan meningkatkan serapan daring mereka.

MC11 akan berlangsung pada 10–13 Desember di Buenos Aires. Ikuti GIP Digital Watch observatory untuk berita terbaru.



Setelah server Uber ditembus pada tahun 2016, perusahaan tersebut membayar penyerangnya untuk menghapus data dan tetap diam.

KEBIJAKAN DIGITAL: PERKEMBANGAN BULAN NOVEMBER

Arsitektur Tata Kelola Internet Global



Relevansi Meningkatkan

Setelah pertemuan UN GGE berakhir tanpa kesepakatan, proses pencarian untuk menyelesaikan persoalan keamanan siber terus berjalan. [Lebih lanjut di halaman 1.](#)

Pembangunan Berkelanjutan



Relevansi Tetap

ITU telah mengumumkan akan menambah indikator untuk menilai dan memberikan peringkat perkembangan ICT di banyak negara. Jumlah indikator menjadi 14, dari semula 11, untuk memotret perkembangan di pasar ICT dengan melihat teknologi teknologi baru. ICT Development Index [adalah tugas utama dari Laporan Tahunan ITU, Measuring the Information Society Report.](#)

Keamanan



Relevansi Meningkatkan

Jumlah serangan *distributed denial of service* (DDoS) terus meningkat seiring banyaknya peralatan IoT yang tidak aman. Laporan dari Corero Network Security [memperlihatkan adanya pertumbuhan sebesar 35% per bulan dibandingkan dengan kuartal sebelumnya, dan 91% peningkatan serangan dibandingkan kuartal pertama 2017.](#)

Kerawanan keamanan di dompet Ethereum membekukan 500.000 unit mata uang kripto, Ether. Kejadian ini terutama untuk transaksi di dompet yang harus disetujui beberapa orang sekaligus (punya beberapa pemilik). Parity Technologies, perusahaan yang bertanggung jawab menyatakan bahwa ada eksploitasi potensi kerawanan secara global yang mengunci secara permanen lebih dari \$150 juta di mata uang kripto [.](#)

Bitcoin melonjak melewati \$11.000 per satu unit, beberapa jam setelah melampaui \$10.000 [.](#) Rencana untuk meningkatkan SegWit2X di sistem pembayaran Bitcoin, dikenal sebagai Kesepakatan New York, telah ditunda. Gagalnya peningkatan ini membuat pengguna Bitcoin tidak mendapatkan dukungan menyeluruh [.](#) Di tingkat global, pertemuan para Menteri WTO juga tidak terlihat mencapai konsensus. [Lebih lanjut di halaman 3.](#)

Di tingkat regional, juga terjadi perubahan dinamis dari e-dagang. Para Menteri perdagangan dari 11 negara yang masih berada di Trans-Pacific Partnership (TPP) mengumumkan bahwa mereka sudah menyetujui elemen dasar dari kesepakatan itu [.](#) Walaupun, perencanaan rapat yang sudah diumumkan terpaksa dibatalkan setelah Perdana Menteri Kanada memutuskan untuk tidak hadir, terkait dengan apa yang belum disepakati Kanada. Negosiasi dari Kanada, Meksiko dan Amerika Serikat menyimpulkan di diskusi mereka yang kelima untuk melakukan modernisasi atas North American Free Trade Agreement (NAFTA) [.](#) Negosiasi ini telah menyumbangkan kemajuan substansial di sektor seperti telekomunikasi, fasilitasi perdagangan, e-dagang dan tantangan teknis untuk berdagang.

Kantor Bendahara Inggris (UK Treasury) sedang menyiapkan aksi sepihak untuk memberikan pajak ke ekonomi digital [.](#) Ini akan mendorong reformasi pajak secara internasional sembari melihat solusi sementara untuk mendapatkan keuntungan dari bisnis digital.

Uber kembali mengalami kesulitan hukum. Di Inggris, perusahaan berbagi tumpangan ini kalah di pengadilan banding yang tahun lalu mengeluarkan keputusan terkait ketenagakerjaan, yang menyatakan bahwa pegawai Uber adalah pekerja yang berhak untuk mendapatkan hak upah minimum [.](#) Perusahaan ini juga berencana untuk terus melawan keputusan tersebut. Pengemudi Uber di Nigeria juga memulai kasus yang sama di Pengadilan Lagos [.](#)

Uber menutupi kebocoran 57 juta data penggunanya, menurut Bloomberg [.](#) [Lebih lanjut di halaman 3.](#) Di Inggris, Google dibawa ke pengadilan atas tuduhan secara ilegal telah mengambil data pribadi lebih dari 5 juta pengguna lewat pengaturan privasi di iPhone mereka [.](#)

Hak Digital



Relevansi Meningkatkan

Majelis Konstituen Venezuela mengeluarkan Undang-undang yang menuliskan "akan menghukum pesan kebenaran yang disebar melalui penyiaran dan media sosial dengan penalti sampai dengan 20 tahun di penjara" [.](#)

Dewan Eropa dan Kaspersky, perusahaan antivirus Rusia bersama perusahaan Internet dan Teknologi Informasi, telah bersumpah untuk melindungi hak asasi manusia dan memastikan untuk mempertahankan Internet yang aman [.](#) Mereka akan bekerja sama untuk melawan eksploitasi seksual anak serta penyalahgunaannya; melawan kejahatan siber dan terorisme serta mempromosikan hak asasi daring.

Kebebasan Internet telah menurun secara berturut-turut selama tujuh tahun terakhir, seperti catatan *Freedom on the Net 2017*, laporan yang dibuat Freedom House [.](#) Penggunaan media sosial untuk "memajukan agenda anti-demokrasi" telah membawa tantangan baru, karena lebih sulit dilawan ketimbang tipe sensor yang biasa, menurut penjelasan direktur proyek ini [.](#)

Jurisdiksi dan Isu Legal



Relevansi Meningkat

Hakim California telah memblokir keputusan Pengadilan Tinggi Kanada tentang Hak untuk Dilupakan agar tidak berlaku Amerika Serikat. [Lebih lanjut di halaman 1.](#)

Komisi Eropa sedang membuat Panel Ahli Tingkat Tinggi untuk berita bohong dan misinformasi daring. [Komisi ini telah meluncurkan konsultasi publik untuk memberikan masukan kepada strategi EU terkait bagaimana menangani berita bohong.](#)

Infrastruktur



Relevansi Tetap

Peraturan baru di Rusia membatasi penggunaan *proxy* seperti jaringan virtual pribadi (VPN) dan *anonymizers*, yang berlaku mulai 1 November.

Dewan Keamanan Rusia telah diketahui menginstruksikan pemerintah untuk mulai berdiskusi di antara negara-negara BRICS (Brasil, Rusia, India, Cina dan Afrika Selatan) tentang kemungkinan membangun sebuah sistem DNS root server alternatif.

Skype milik Microsoft telah dihapus dari beberapa toko aplikasi Cina, termasuk yang dioperasikan Apple dan Android. [Apple telah mendapat pemberitahuan dari Kementerian Keamanan Publik bahwa 'sejumlah aplikasi voice over Internet protocol \(VOIP\) tidak sejalan dengan peraturan lokal'.](#)

Netralitas Jaringan



Relevansi Meningkat

Federal Communications Commission (FCC) AS sedang menyiapkan pemungutan suara untuk mengaktifkan kembali aturan netralitas jaringan tahun 2015. [Lebih lanjut di halaman 6.](#)

Otoritas Regulator Telekomunikasi India mengeluarkan sekumpulan rekomendasi yang mendukung netralitas jaringan, dengan memperhatikan bahwa lisensi berjangka waktu tertentu yang berlaku untuk penyedia layanan Internet (ISPs) selanjutnya mencakup batasan eksplisit terhadap segala bentuk diskriminasi akses Internet berdasarkan konten yang diakses, protokol yang digunakan atau peralatan yang dipakai.

Teknologi Baru, IoT, AI dll



Relevansi Meningkat

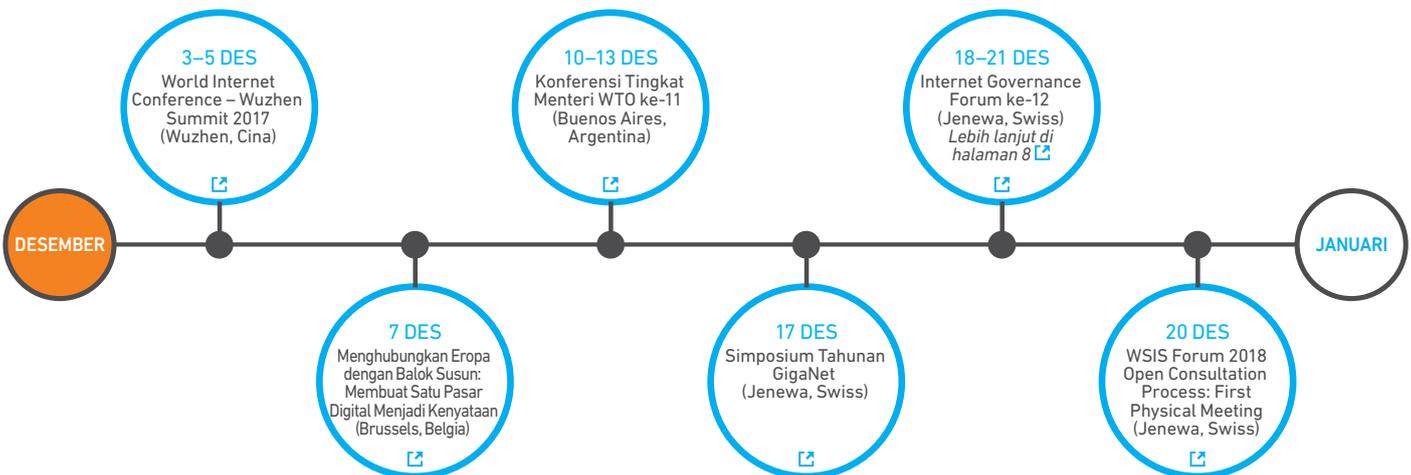
GGE untuk LAWS bertemu untuk pertama kali di Jenewa, untuk mendiskusikan teknologi, militer, hukum, dan isu etis seputar LAWS. [Lebih lanjut di halaman 1 dan 7.](#)

Di Tokyo, chatbot Shibuya Mirai – diprogram untuk meniru anak laki-laki usia 7 tahun – diberikan rumah tinggal resmi. [Chatbot tersebut ditujukan untuk membuat pemerintah lokal lebih dikenal dan mudah diakses oleh penduduk, memungkinkan para pejabat untuk mendengar opini mereka.](#)

Di Arizona, AS, perusahaan Waymo milik Alphabet telah memulai pengetestan mobil nir-awak di jalanan umum, tanpa sopir pendamping. [Inggris mengumumkan rencana untuk mobil yang benar-benar tanpa operator manusia, pada tahun 2021. Singapura menargetkan untuk memiliki bus tanpa sopir pada 2022.](#)

Sebuah laporan yang diterbitkan oleh Pusat Studi Kebijakan di Inggris berpendapat bahwa mengenakan pajak pada robot tidak akan melindungi pekerjaan, dan seruan untuk pendapatan dasar yang universal adalah prematur, karena akan mengubah pasar tenaga kerja.

DI DESEMBER



Untuk informasi acara yang akan datang, kunjungi <http://dig.watch/events>

NETRALITAS JARINGAN DALAM KETIDAKPASTIAN

Desember ini, FCC Amerika Serikat diharapkan menarik kembali dukungan kepada netralitas jaringan. Regulasi tahun 2015 sangat kuat mendukung netralitas jaringan. Apakah kebijakan baru akan mengurangi perlindungan terhadap prinsip netralitas jaringan?

Awal tahun ini, FCC Amerika Serikat mengumumkan niatnya untuk menarik kebijakan tersebut. Kampanye ini dipimpin ketuanya, Ajit Pai. Mayoritas FCC yang berasal dari kalangan Republik diharapkan mengambil suara di bulan Desember untuk menggantikan Perintah Internet Terbuka 2015 dengan Perintah Pembaruan Kebebasan Internet yang baru.

Peraturan tahun 2015 sangat mendukung netralitas jaringan. FCC melakukan klasifikasi ulang terkait akses ke penyelenggara jasa Internet, disebut sebagai pembawa utilitas, di mana akses Internet berada di bawah otoritas dan supervisi FCC. Hal ini bertujuan untuk memastikan agar kecepatan serta pemilihan isi yang diberikan penyedia jasa pada pelanggan berlaku tanpa ada intervensi apapun dari penyedia jasa.

Kebijakan baru yang disebar pada November, akan mengembalikan klasifikasi dari penyedia *broadband* menjadi penyedia "jasa informasi", yang akan membatasi otoritas FCC, dan memungkinkan penyedia jasa untuk membangun sistem yang melanggar prinsip netralitas jaringan. Kebijakan baru ini hanya meminta ISP agar transparan dan membuka informasi terkait praktik mereka ke konsumen, pengusaha dan komisi.

Reaksi beragam

Rancangan kebijakan ini mendapatkan dukungan dari perusahaan seperti Verizon dan Comcast. Mereka juga meminta FCC untuk mengeluarkan peraturan yang mengonfirmasi keutamaan hukum federal, dan mencegah negara bagian untuk secara lokal mengadopsi peraturan netralitas jaringan sendiri, ketika perintah baru ini sudah berlaku.

Namun, perusahaan Internet lain menentang rencana baru itu. Google, Facebook dan Netflix adalah beberapa di antaranya. Mereka percaya bahwa peraturan lama telah berlaku secara baik. Sebanyak 200 perusahaan teknologi lain seperti AirBnB, Reddit dan Twitter sepakat dengan pandangan ini. Mereka sudah mengirimkan surat ke FCC yang meminta agar komisi itu menentang peraturan baru.

Di luar Amerika, reaksi datang dari Kanada. Perdana Menteri Justin Trudeau telah mengekspresikan keprihatinan atas kemungkinan peraturan netralitas jaringan di Amerika Serikat dikembalikan ke versi sebelumnya. Dia mengatakan, netralitas jaringan 'sangat penting untuk kelompok bisnis kecil dan konsumen. Sangat penting untuk menjaga kebebasan terkait Internet tetap hidup'.

Saat semua mata diarahkan ke Amerika Serikat, India juga juga mendapatkan perhatian karena Otoritas Peraturan

Telekomunikasi baru saja mengumumkan rekomendasi yang mendukung netralitas jaringan.

Apa yang akan terjadi selanjutnya?

Dengan beberapa minggu menjelang pengambilan suara di FCC, ada beberapa skenario yang mungkin terjadi:

1. **Aktivisme.** Juli tahun ini, perusahaan besar Internet dan organisasi masyarakat sipil ikut serta dalam 'hari beraksi' yang dilakukan masif secara daring untuk mendukung netralitas jaringan, sebagai bagian dari kampanye *Battle for the Net*. Kampanye ini telah diluncurkan ulang dan aktivis di seluruh Amerika Serikat berencana melakukan protes pada 7 Desember. Masih harus dilihat lagi apakah aksi seperti ini akan mencapai tujuan yang diharapkan.

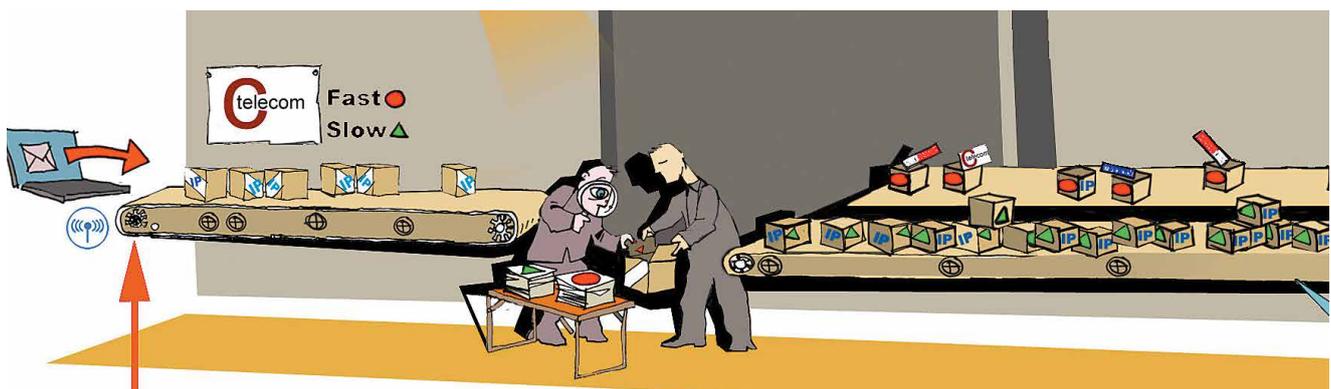
2. **Kongres.** Dalam sebuah wawancara September lalu, Pai, Ketua FCC telah menyatakan mendukung Kongres untuk menangani isu netralitas jaringan karena menurutnya, "(Kongres) memiliki posisi tepat untuk menangani isu ini dan melihat apa peraturan yang baik untuk masa depan".

Hal ini mungkin terjadi karena ada beberapa permintaan yang meminta Kongres untuk ikut dan mulai mengerjakan peraturan yang mendukung netralitas jaringan. Namun, ada juga kemungkinan –paling tidak teori— bahwa Kongres meloloskan Resolusi Kongres untuk Tidak Setuju, dan membuang pencabutan FCC atas Perintah Internet Terbuka 2015. Kemungkinan dua pilihan ini menjadi kenyataan masih belum jelas.

3. **Aksi Pengadilan.** Jika FCC meloloskan perintah yang dikeluarkan ketuanya, sangat mungkin hal itu untuk dilawan di pengadilan, berdasarkan alasan bahwa hal ini tidak bisa dijustifikasi. Yurisprudensi Amerika menyatakan bahwa badan negara tidak bisa membalik peraturan yang ada tanpa argumentasi kuat:

Keputusan Mahkamah Agung pada 1983 mengungkap bahwa 'lembaga negara yang membatalkan sebuah peraturan harus memberikan alasan sangat berdasar lebih dari yang mungkin dibutuhkan ketika sebuah lembaga negara tidak bertindak di kesempatan pertama'. Para komentator memberikan argumen bahwa ini tidak relevan dengan usulan yang diajukan, yang terlihat didasarkan atas argumen bahwa investasi di infrastruktur *broadband* telah mengalami penurunan selama dua tahun terakhir.

Ikuti GIP Digital Watch observatori untuk informasi lebih baru.



SISTEM SENJATA MEMATIKAN OTONOM: PARA AHLI MEMETAKAN ISU UTAMA

Teknologi selalu merevolusi konflik. Saat ini, masyarakat sedang berada di tepian perkembangan eksistensi teknologi: hilangnya kontrol manusia dalam peperangan. Bulan November, GGE mengeksplorasi teknologi, militer, hukum dan implikasi etik terkait sistem-sistem itu.

Untuk menghindari skenario di mana Sistem Senjata Mematikan Otonom/ Lethal Autonomous Weapons Systems (LAWS) bisa membuat kejahatan tidak perlu, negara-negara yang telah menandatangani kesepakatan, membentuk GGE untuk melakukan pengujian isu terkait teknologi baru, termasuk LAWS, dengan keikutsertaan beragam pemangku kepentingan. Dalam diskusi 13 – 17 November, 5 isu utama muncul.

1. Prediktabilitas dan realitabilitas: Apakah kita bisa mempercayai robot pembunuh?

Walaupun sempurna sistem senjata otonom bisa menjadi sumber ketakutan, tetapi tantangan utama adalah potensi dari sistem yang tidak sempurna. Karena mereka dituntut oleh teknologi semacam pembelajaran oleh mesin, aktivitas LAWS akan sulit diprediksi dan hasil yang diharapkan tidak bisa dijamin. Ini juga membuat pertanyaan bagaimana standar etika dan hukum internasional bisa menjadi bagian dari algoritma di balik sistem persenjataan.

Potensi dari LAWS yang sulit diprediksi juga berarti bahwa LAWS akan jarang digunakan. Harus ada sebuah tingkat kepercayaan dan keyakinan di teknologi sebelum bisa digunakan untuk tujuan militer.

2. Proliferasi dan perlombaan senjata: menuju kehancuran bersama atau pencegahan?

Banyak pihak khawatir bahwa negara yang membangun LAWS tidak akan mampu menahan penyebarannya sehingga bisa menuju perlombaan senjata. Ada juga keprihatinan bahwa perkembangan sistem tersebut justru akan melawan populasi mereka sendiri maupun digunakan juga kelompok teroris serta aktor non-pemerintah. Dalam hal ini, beberapa pihak mempertanyakan sejauh mana pengembangan dari sektor swasta untuk teknologi ini perlu diregulasi.

Proliferasi dari LAWS bisa memiliki dampak penting terhadap kedamaian dan keamanan dunia, walaupun saat ini kita hanya bisa membuat spekulasi atas konsekuensinya. Misalnya, bisa saja ada pencegahan bersama antar-negara yang memiliki LAWS, tapi mungkin saja ada menuju kehancuran bersama.

3. Kemanusiaan dalam konflik: Haruskah kita outsource keputusan hidup dan mati?

Banyak pihak berargumen bahwa mesin tidak bisa menggantikan penilaian kualitatif manusia, sebagai dasar untuk membunuh manusia. Membuat keputusan semacam itu membutuhkan belas kasih dan intuisi, hal yang tidak bisa diharapkan dari robot. Kendati LAWS bisa mengambil keputusan cepat dan tepat, tapi mereka tidak bisa mengevaluasi konteks.

Mengalih daya (*outsource*) keputusan hidup dan mati kepada mesin tidak hanya memberikan risiko adanya keputusan yang salah, tapi juga akan membuat perang semakin tidak manusiawi dan bisa menurunkan standar penggunaan kekuatan.

Namun, ada pihak yang memberikan klaim bahwa sistem senjata otonom memberikan tawaran potensi keuntungan kemanusiaan dan bisa mengurangi kerugian. Mesin bisa mengambil keputusan

lebih cepat dengan kualitas lebih bagus, yang akhirnya bisa berkontribusi pada perlindungan warga sipil dan proporsi dari serangan. Tambahan lain, manusia sering kali juga tidak etis.

4. Pertanggungjawaban: Bagaimana kita bisa meminta robot akuntabel?

Satu keprihatinan utama terkait akuntabilitas. Apabila senjata otonom bisa melakukan serangan mematikan, siapa yang bertanggung jawab? Karena LAWS mencakup banyak titik tanggung jawab di rantai militer, akan sulit menentukan siapa yang bertanggung jawab. Ada juga ketakutan bahwa ketidakjelasan tanggung jawab akan mengarah ke kekebalan hukum. Lagipula, hukum berlaku di manusia dan tanggung jawab hukum ada pada mereka yang merencanakan, memutuskan dan melakukan serangan. Tanggung jawab dan akuntabilitas semacam ini tidak bisa diserahkan pada mesin. Dalam konteks ini, beberapa negara berhati-hati dalam menentang penyediaan sistem otonom dengan kepribadian legal.

5. Dua kegunaan: bagaimana bila kekuatan untuk kejahatan secara simultan juga adalah kekuatan untuk kebaikan?

Aplikasi masa depan dari AI dan robotika di banyak sisi kehidupan manusia dan ekonomi, bisa membawa keuntungan untuk manusia, telah mendorong beberapa negosiator untuk berhati-hati membuat regulasi tambahan, atau melarang LAWS. Namun, dua kegunaan teknologi semacam ini juga berarti bahwa senjata otonom yang dirancang untuk digunakan manusia bisa berubah menjadi senjata mematikan, memberikan komplikasi tambahan ke isu itu.

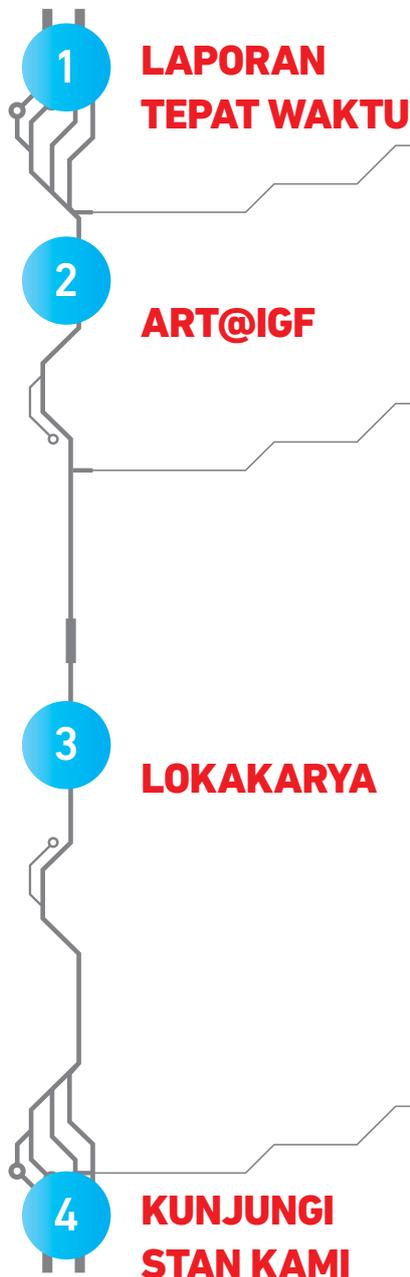
Silakan baca laporan lengkap hasil dari rapat GGE terkait LAWS. [🔗](#)



Kredit: Siyan Ren on Unsplash

GIP DI INTERNET GOVERNANCE FORUM KE-12

Geneva Internet Platform akan aktif berpartisipasi di Internet Governance Forum ke-12, di Jenewa dan daring. Mari bergabung bersama kami di aktivitas berikut dan pantau terus laporan-laporan sesi tepat waktu dan ringkasan harian IGF.



GIP Digital Watch observatori akan menyediakan laporan-laporan sesi dari IGF, dan newsletter harian IGF, yang akan tersedia di laman khusus dig.watch/igf2017. Laporan akhir setelah pertemuan IGF akan meringkas tema-tema utama. Laporan ini akan menjadi pelengkap dari pembaruan dinamis yang disediakan melalui observatori.

Proyek ini akan menghubungkan kebijakan digital dengan seni melalui pameran isu digital yang interaktif dan interdisiplin. Pameran ini akan menggunakan peta kereta bawah tanah sebagai metafor perjalanan untuk menjelajah isu tata kelola Internet yang beragam (infrastruktur, keamanan, hak asasi, dll.). Masing-masing digambarkan sebagai rute kereta bawah tanah yang berbeda warna di lantai ruang pameran. Ketika partisipan mengikuti rute berbeda, mereka akan sampai di stasiun kereta di mana seniman digital memeragakan persepsi mereka atas isu utama kebijakan digital hari itu.

GIP turut mengadakan lokakarya berikut di IGF:

Tata kelola data dan kebijakan: Mengembangkan kurikulum (WS186) [📄](#)
 Senin, 18 Desember, 09:00–10:30, Ruang XI - A

Data menjadi inti dari masyarakat modern, mulai dari jejak digital via e-mail dan media sosial, sampai ke analisis *big data*. Walaupun tata kelola data dan kebijakan membutuhkan keahlian dan teknik baru, kebutuhan akan ahli kebijakan data tidak terpenuhi. Lokakarya ini akan mendiskusikan kurikulum yang seharusnya digunakan untuk pengembangan kapasitas, pelatihan, dan aktivitas akademik untuk meningkatkan mutu pembuatan kebijakan.

Konvensi Digital Jenewa untuk melindungi ruang siber (WS34) [📄](#)
 Selasa, 19 Desember, 10:40–12:10, Ruang XXI - E

Karena keamanan siber sangat penting untuk perdamaian internasional dan stabilitas ekonomi, pembentukan Konvensi Digital Jenewa dapat memainkan peran sentral dalam menjaga masyarakat, infrastruktur, dan perusahaan swasta di seluruh dunia dari serangan siber yang dipimpin negara atau sanksi dari negara pada saat damai. Lokakarya ini akan mempertemukan pakar keamanan siber dan kebijakan teknologi dari kelompok pemangku kepentingan berbeda untuk meningkatkan kesadaran terhadap isu penting norma keamanan siber, kesenjangan usaha internasional, dan realitas, serta untuk mendiskusikan potensi arah di masa depan.

Sebagai tambahan, tim GIP dan Diplo akan terlibat dalam beberapa sesi lain, sebagai pembicara, moderator di lokasi dan online, dan pembuat laporan.

GIP dan Diplo akan memiliki stan khusus di IGF Village. Kunjungi kami sepanjang pekan, untuk mendapatkan salinan *IGF Dailies*, dan publikasi tentang tata kelola Internet lainnya (termasuk edisi terakhir *Geneva Digital Watch* newsletter, buku *Introduction to Internet Governance*, dan buklet IG Acronyms).



Langganan GIP Digital Watch terkini di <http://dig.watch>